



## Resolusi konflik lahan dan kekayaan alam merupakan jalan panjang.

Selama lebih dari dua dasawarsa, sektor usaha kehutanan dan perkebunan di Indonesia mengalami perluasan yang sangat pesat. Salah satu konsekuensinya adalah meningkatnya konflik lahan dan kekayaan alam. Walaupun kesadaran akan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat dari konflik tersebut mulai terbangun, banyaknya konflik tersebut masih menuntut perhatian kita semua.

Sepanjang tahun 2021, Conflict Resolution Unit melanjutkan kerja-kerja untuk mendukung prakarsa-prakarsa resolusi konflik lahan dan kekayaan alam melalui pendekatan mediasi di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan perubahan iklim. Pada tahun ini, CRU secara intensif mempromosikan pendekatan peka konflik sebagai pendekatan intervensi

pembangunan yang berupaya setidaknya untuk tidak memberikan dampak buruk dan jika bisa, mendorong terjadinya perubahan sosial yang positif melalui penyelesaian konflik.

Selain menangani beberapa kasus di tingkat tapak dan mempromosikan pendekatan peka konflik, CRU juga berupaya meningkatkan kapasitas mitra, menyempurnakan kerangka asesmen untuk membangun dasar informasi guna penanganan kasus hingga upaya-upaya penjangkauan guna penguatan konstituennya.

Catatan perjalanan 2021 berikut ini merangkum berbagai kegiatan CRU sepanjang tahun 2021.

Salam Damai.

## JANUARI

- ✓ Diskusi peninjauan kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
- ✓ Tes uji coba untuk Bahan Belajar Fasilitasi Kemitraan dan Resolusi Konflik untuk Perkebunan Kelapa Sawit.

## FEBRUARI

- ✓ Koordinasi dengan Asosiasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.

## MARET

- ✓ Webinar Belajar dari Subak Bali: Pengelolaan Kekayaan Alam yang Seimbang dan Peka Konflik. ([Lihat di sini](#))



## APRIL

- ✓ Orientasi kepada Ditjen Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait proposal kepada Ford Foundation.
- ✓ Koordinasi dengan Wakil Menteri ATR/BPN terkait dukungan CRU dalam penanganan kasus terkait Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

## MEI

- ✓ Kickoff kerjasama dengan Universitas Brawijaya.
- ✓ Webinar Konflik antara Masyarakat dengan Satwa Liar. ([Lihat di sini](#))

## JUNI

- ✓ Pemateri kursus online resolusi konflik untuk koalisi Good Governance and Sustainable Development.



## JULI

- ✔ Emergency response untuk COVID-19.
- ✔ Webinar Peran Batas Desa dalam Resolusi Konflik Tenurial. ([Lihat di sini](#))
- ✔ Serah terima Bahan Belajar Fasilitasi Kemitraan dan Resolusi Konflik untuk Perkebunan Kelapa Sawit.

## AGUSTUS

- ✔ Pendalaman informasi awal kasus LPRA di provinsi Jawa Timur.
- ✔ Pertemuan kick off kerjasama dengan Astra Agro Lestari.
- ✔ Nawala Layang Damai: COVID 19 sebagai Game Changer dalam Penanganan Konflik Agraria di masa pandemi. ([Lihat di sini](#))





## SEPTEMBER

- ✓ Webinar Nyanyian Pulau Kelapa: Potret Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. ([Lihat di sini](#))
- ✓ Inisiasi Kerjasama Klinik Resolusi Konflik dengan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- ✓ Nawala Layang Damai: Jalan Singkat atau Jalan Panjang sampai ke Tujuan? Peran Kunci Pengkajian dalam Penanganan Konflik. ([Lihat di sini](#))

## OKTOBER

- ✓ Keikutsertaan dalam pameran Paviliun Indonesia untuk COP 26 di Manggala Wanabakti.
- ✓ Pelibatan dukungan pemerintah daerah pada kasus LPRA di Provinsi Jawa Timur.
- ✓ Nawala Layang Damai, Bagaimana Menyikapi, Netralitas dalam Menangani Konflik dengan Realita Ketidakadilan? ([Lihat di sini](#))

## NOVEMBER

- ✔ Kick off kerjasama penyelenggaraan kursus online Peka Konflik untuk mitra komunitas Samdhana Institute.
- ✔ Webinar Memotret Penataan Ruang dan Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. ([Lihat di sini](#))
- ✔ Nawala Layang Damai, Resolusi Konflik dan Perubahan Iklim. ([Lihat di sini](#))

## DESEMBER

- ✔ Penyeepakatan Konsep Kelembagaan.
- ✔ Nawala Layang Damai, Menciptakan dan Memelihara Momentum Mediasi. ([Lihat di sini](#))





## Penanganan kasus LPRA

Untuk memperkaya portofolio kemampuan CRU dalam penanganan kasus, CRU membangun kerjasama dengan Tim WAMEN ATR/BPN melalui penanganan kasus prioritas GTRA. Kasus yang dipilih merupakan kasus prioritas nasional yang harus diselesaikan dalam rangka pelaksanaan mandat Reforma Agraria. Penanganan kasus prioritas ini menjadi bagian pembelajaran bersama dari kegiatan penanganan konflik agraria terutama terkait aspek manajerial penanganan kasus, metodologi penyelesaian konflik, dan pendekatan dalam membangun kepercayaan para pihak (trust buiding).

Wilayah: Provinsi Jawa Timur dan Jambi.





## Pengembangan kelembagaan independen.

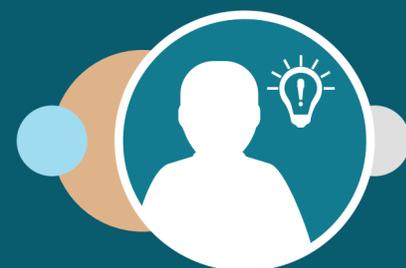
Independensi merupakan karakter mendasar bagi kelembagaan pengelolaan konflik agraria dan kekayaan alam yang mumpuni dan kredibel. Independensi menjadi unsur kunci membangun kepercayaan atas netralitas dan imparialitas bagia para pihak yang berkonflik.

CRU berkonsultasi secara intensif dengan para praktisi di bidang resolusi konflik, akademisi dan pemerintah untuk membangun perspektif yang tepat dan memadai tentang kelembagaan independen resolusi konflik yang adaptif terhadap tingginya dinamika perubahan.



# 5

## Prinsip kelembagaan yang independen



Berorientasi jangka-panjang baik dalam hal kelembagaan maupun penyelesaian konflik yang ditangani;



Memiliki sumber pembiayaan yang independen dan berkelanjutan;



Memiliki dasar hukum yang kuat untuk kejelasan wibawa, peran, fungsi dan kewenangannya, serta dapat bekerja lintas sektor;



Melibatkan lembaga-lembaga pelaku resolusi konflik yang sudah ada serta sumberdaya manusia yang profesional; dan,



Memiliki sistem, manajemen, dan pembelajaran yang terus menerus berkembang dan disempurnakan.





## Perluasan dan Penguatan Konstituen

CATATAN TAHUNAN 2021



Konstituen menjadi modal penting bagi prakarsa CRU menangani dan mengelola konflik agraria dan kekayaan alam. CRU bekerjasama dengan berbagai pihak strategis untuk merawat, menguatkan, dan memperluas konstituen melalui keterlibatan dalam pelaksanaan resolusi konflik, baik yang diprakarsai pemerintah, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi maupun sektor swasta. Diantaranya melalui konsultasi, kolaborasi penanganan kasus, hingga peningkatan kapasitas resolusi konflik.

Kerjasama CRU dengan kalangan akademis merupakan prakarsa yang membanggakan sepanjang 2021. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dan Universitas Brawijaya. Selain itu, CRU juga turut terlibat dalam kursus Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends, yang merupakan kolaborasi fakultas kehutanan beberapa perguruan tinggi di Indonesia.





## Portofolio

- ✓ Kerjasama kajian bisnis dan HAM dengan Astra Agro Lestari.
- ✓ Melanjutkan kerjasama dengan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- ✓ Mendukung Wamen ATR/BPN sebagai Koordinator GTRA Nasional dalam penanganan kasus LPRA di Jawa Timur dan Jambi.



## Menjaga Kehadiran

- ✓ Kerjasama webinar dengan Terasmitra
- ✓ Penerbitan nawala bulanan: Layang Damai.





Conflict  
Resolution  
Unit

CATATAN  
TAHUNAN

